

**MARKET-DRIVEN DEVELOPMENT DALAM PENGEMBANGAN
HILIRISASI KELAPA SAWIT: ANALISIS RANTAI NILAI DAN
STRATEGI DI PROVINSI RIAU**

Azrul Muslihin^{1*}

¹Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau-Indonesia

***Penulis Korespondensi:** azrul.muslihin01@gmail.com

INFO NASKAH

Diterima
2 Juli 2026
Direvisi
10 Agustus 2026
Diterima
1 September 2026
Diterbitkan
1 September 2026

ABSTRAK

Provinsi Riau merupakan salah satu sentra utama perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan luas areal sekitar 3,37 juta hektare dan produksi lebih dari 9 juta ton per tahun. Besarnya kapasitas produksi tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan daerah menangkap nilai tambah dari aktivitas hilir. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi rantai nilai kelapa sawit Riau, perkembangan produksi dan harga, kesenjangan orientasi program daerah dengan kebutuhan pasar, serta merumuskan strategi pengembangan sektor berbasis pasar untuk mendorong hilirisasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kuantitatif dan kualitatif berbasis data sekunder periode 2021–2025 yang bersumber dari BPS Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dan dokumen kebijakan terkait. Analisis dilakukan melalui tren time-series, value chain analysis, gap analysis, dan SWOT. Hasil menunjukkan bahwa perkebunan rakyat menguasai 68,1% luas areal pada 2024, tetapi produktivitas tahun 2025 hanya 2,49 ton/ha, lebih rendah daripada perkebunan besar swasta sebesar 3,20 ton/ha dan perkebunan besar negara sebesar 4,79 ton/ha. Selama 2021–2025, luas areal rakyat meningkat 42,3%, produksi 54,6%, sedangkan produktivitas hanya meningkat 8,7%. Gap analysis menunjukkan bahwa program daerah yang dianalisis masih lebih kuat berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi, sedangkan peluang permintaan baru banyak dibentuk oleh kebijakan nasional. Berdasarkan temuan tersebut, strategi yang direkomendasikan meliputi pengembangan klaster hilirisasi, pengaitan replanting dengan kepastian pasar, penguatan sistem informasi industri hilir, diversifikasi pasar, sinergi kebijakan nasional, dan penguatan kelembagaan petani.

Kata kunci: Pengembangan Berbasis Pasar; Hilirisasi; Nilai Tambah; Kelapa Sawit; Rantai Nilai; Riau

ABSTRACT

Riau Province is one of Indonesia's major oil palm plantation centers, with approximately 3.37 million hectares of planted area and annual production exceeding 9 million tons. This production capacity has not been fully translated into higher regional value capture from downstream activities. This study analyzes the palm oil value chain in Riau, production

and price trends, gaps between regional development programs and market orientation, and strategies for market-based sector development to promote downstream processing. The study employs a descriptive approach combining quantitative and qualitative analysis of secondary data for 2021–2025 obtained from the Riau Provincial Statistics Agency, the Riau Plantation Office, and relevant policy documents. The analysis uses time-series trends, value chain analysis, gap analysis, and SWOT. The results show that smallholder plantations accounted for 68.1% of planted area in 2024, while their 2025 productivity was only 2.49 tons/ha, below private estates at 3.20 tons/ha and state-owned estates at 4.79 tons/ha. During 2021–2025, smallholder planted area increased by 42.3% and production by 54.6%, whereas productivity increased by only 8.7%. Gap analysis indicates that the regional programs examined remain more strongly oriented toward production capacity, while emerging market demand is largely shaped by national policies. The study recommends six strategies: cluster-based downstream development, market-linked replanting, stronger downstream industry information systems, export market diversification, alignment with national policies, and stronger farmer institutions.

Keywords: Market-Based Development; Downstreaming; Value Added; Palm Oil; Value Chain; Riau

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu sentra utama perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan kontribusi besar terhadap produksi dan perekonomian daerah. Luas areal perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar 3,4 juta hektare dan produksi lebih dari 9 juta ton per tahun menunjukkan bahwa Riau memiliki basis sumber daya dan kapasitas produksi yang kuat. Kondisi tersebut menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis dalam perekonomian daerah. Namun, besarnya kapasitas produksi belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi nilai ekonomi yang dapat ditangkap di tingkat daerah, terutama melalui penguatan aktivitas pengolahan dan hilirisasi.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas produksi, tetapi juga dengan struktur rantai nilai kelapa sawit. Pada tingkat hulu, sebagian besar aktivitas masih berorientasi pada produksi tandan buah segar (TBS) yang kemudian diolah menjadi *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel*. Sementara itu, pengembangan produk turunan dengan tingkat pengolahan dan nilai tambah yang lebih tinggi membutuhkan keterhubungan yang lebih kuat antara perkebunan, industri pengolahan, kelembagaan pelaku usaha, dan pasar. Penelitian mengenai rantai nilai hilir kelapa sawit di Riau menunjukkan bahwa aktivitas hilir telah berkembang di kawasan industri Dumai dan mencakup produk *oleofood*, *oleokimia*, dan *oleofuel*. Namun, rantai nilai tersebut masih berjalan secara relatif independen dan belum menunjukkan integrasi horizontal yang kuat antarpelaku.

Permasalahan penguatan rantai nilai menjadi semakin penting karena perkebunan rakyat memiliki posisi dominan dalam struktur perkebunan kelapa sawit Riau. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, perkebunan rakyat menguasai sekitar 68,1% dari total luas areal kelapa sawit Riau. Namun, produktivitas perkebunan rakyat masih lebih rendah dibandingkan perkebunan besar. Pada tahun 2025, produktivitas perkebunan rakyat tercatat sebesar 2,49 ton per hektare, sedangkan perkebunan besar swasta mencapai 3,20 ton per hektare dan perkebunan besar negara mencapai 4,79 ton per hektare. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan nilai ekonomi sektor kelapa sawit tidak dapat hanya diarahkan pada pembangunan industri hilir, tetapi juga perlu memperhatikan produktivitas dan posisi perkebunan rakyat sebagai pemasok utama bahan baku.

Dinamika perkembangan perkebunan rakyat selama periode 2021–2025 juga memperlihatkan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Luas areal meningkat sebesar 42,3%, sedangkan produksi meningkat sebesar 54,6%. Pada periode yang sama, produktivitas hanya meningkat sebesar 8,7%, dari 2,29 ton per hektare menjadi 2,49 ton per hektare. Pola tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi masih memiliki keterkaitan yang kuat dengan pertambahan luas areal, sementara peningkatan produktivitas berlangsung relatif lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan sektor yang tidak hanya mengejar peningkatan volume produksi, tetapi juga memperkuat produktivitas, efisiensi, kualitas bahan baku, akses pasar, dan keterhubungan dengan industri hilir.

Selain persoalan produktivitas, perkembangan sektor kelapa sawit Riau juga dipengaruhi oleh dinamika pasar dan kebijakan. Perubahan kebijakan perdagangan, pengembangan biodiesel, serta tuntutan terhadap keberlanjutan produk sawit menciptakan lingkungan usaha yang semakin dinamis. Di sisi pasar, tujuan perdagangan kelapa sawit Riau telah menunjukkan diversifikasi, sehingga peluang pengembangan pasar tidak hanya ditentukan oleh peningkatan volume produksi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam merespons perubahan permintaan, persyaratan pasar, struktur harga, dan peluang pengembangan produk turunan. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan pengembangan sektor yang mampu menghubungkan kapasitas produksi dengan kebutuhan dan peluang pasar.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *market-driven development* menjadi relevan karena menempatkan kebutuhan dan dinamika pasar sebagai salah satu dasar dalam menentukan arah pengembangan sektor. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *market orientation* yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap pelanggan, pesaing, dan koordinasi antarfungsi dalam menciptakan nilai. Narver dan Slater (1990) menunjukkan bahwa orientasi pasar memiliki hubungan positif dengan kinerja bisnis, sementara Kohli dan Jaworski (1990) menekankan pentingnya menghasilkan, menyebarkan, dan merespons informasi pasar dalam organisasi. Dengan mengadaptasi prinsip tersebut pada konteks pembangunan sektor perkebunan, pengembangan kelapa sawit tidak cukup diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi perlu menghubungkan produksi dengan perkembangan pasar, pengolahan, kelembagaan, dan penciptaan nilai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek pengembangan kelapa sawit di Provinsi Riau. Aulia et al. (2020) mengkaji nilai ekonomi jasa ekosistem pada lanskap yang didominasi kelapa sawit di Provinsi Riau. Heriyanto et al. (2019) membahas faktor-faktor yang berkaitan dengan produktivitas kelapa sawit rakyat. Syahza et al. (2021) menunjukkan

pentingnya pengembangan komoditas perkebunan dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah. Usapein et al. (2022) menyoroti pentingnya pendekatan strategis dalam pengembangan industri kelapa sawit. Febrian dan Yuza (2023) mengidentifikasi persoalan tata kelola kebijakan perkebunan di Riau, sedangkan Hariyanti et al. (2024) menunjukkan pentingnya sektor kelapa sawit dalam transformasi ekonomi daerah. Hatmaja et al. (2024) membahas persoalan tata kelola kebijakan harga TBS, sementara Irawan et al. (2026) menyoroti masih adanya kendala kapasitas kelembagaan dan manajerial koperasi kelapa sawit di Riau.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar penting dalam memahami produktivitas, nilai ekonomi, tata kelola, kelembagaan, dan transformasi sektor kelapa sawit. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tertentu dari sektor kelapa sawit, seperti produktivitas, kelembagaan, kebijakan harga, atau pengembangan komoditas. Di sisi lain, kajian mengenai rantai nilai hilir juga telah berkembang, tetapi belum banyak mengintegrasikan dinamika produksi daerah, perkembangan pasar, orientasi program pemerintah, struktur rantai nilai, dan strategi pengembangan sektor dalam satu kerangka analisis. Padahal, kemampuan daerah penghasil bahan baku dalam menangkap nilai tambah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan industri hilir, tetapi juga oleh keterhubungan antara produsen bahan baku, kelembagaan, industri, kebijakan, dan pasar.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* berupa keterbatasan kajian yang mengintegrasikan perspektif produksi, pasar, rantai nilai, dan kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan kelapa sawit berbasis pasar di Provinsi Riau. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan analisis perkembangan luas areal, produksi, produktivitas, dan harga; pemetaan rantai nilai; analisis kesenjangan antara program pengembangan sektor dan kebutuhan pasar; serta analisis SWOT. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi kondisi sektor, tetapi juga menelusuri hubungan antara persoalan hulu, peluang hilirisasi, dinamika pasar, dan kapasitas kelembagaan sebagai dasar perumusan strategi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif *market-driven development* dengan analisis rantai nilai dan kondisi pengembangan sektor kelapa sawit daerah. Dengan perspektif tersebut, hilirisasi tidak diposisikan semata-mata sebagai pembangunan kapasitas industri pengolahan, tetapi sebagai bagian dari strategi pengembangan sektor yang perlu disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku, produktivitas perkebunan rakyat, peluang pasar, diversifikasi produk, kelembagaan pelaku, dan arah kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani keunggulan produksi kelapa sawit Riau dengan kebutuhan untuk memperkuat penciptaan nilai tambah di tingkat daerah.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi rantai nilai komoditas kelapa sawit di Provinsi Riau; (2) menganalisis perkembangan luas areal, produksi, produktivitas, dan harga kelapa sawit; (3) mengidentifikasi kesenjangan antara program pengembangan sektor kelapa sawit daerah dengan dinamika dan kebutuhan pasar; (4) mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan hilirisasi; dan (5) merumuskan strategi pengembangan sektor kelapa sawit berbasis pasar untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di Provinsi Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Market-Driven Development dan Orientasi Pasar

Pendekatan *market-driven development* menempatkan kondisi dan dinamika pasar sebagai dasar dalam menentukan arah pengembangan suatu sektor. Berbeda dengan pendekatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi semata, pendekatan berbasis pasar mempertimbangkan kebutuhan konsumen, perubahan permintaan, struktur persaingan, perkembangan harga, serta peluang pengembangan produk dalam menentukan keputusan produksi dan investasi. Dalam konteks pembangunan sektor ekonomi daerah, orientasi tersebut berarti bahwa program pemerintah tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga memastikan bahwa peningkatan kapasitas produksi memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pasar dan peluang penciptaan nilai tambah.

Konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan *market orientation*. Narver dan Slater (1990) menjelaskan bahwa orientasi pasar mencakup orientasi terhadap pelanggan, orientasi terhadap pesaing, dan koordinasi lintas fungsi sebagai bagian dari proses penciptaan nilai bagi pelanggan. Orientasi pasar juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan informasi mengenai pasar untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kohli dan Jaworski (1990) memandang orientasi pasar sebagai proses organisasi dalam menghasilkan informasi mengenai kebutuhan pasar, menyebarkan informasi tersebut di dalam organisasi, dan meresponsnya melalui tindakan yang sesuai.

Dalam penelitian ini, konsep *market-driven development* diadaptasi pada konteks pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit daerah. Orientasi pasar tidak dipahami hanya sebagai aktivitas pemasaran perusahaan, tetapi sebagai prinsip dalam merancang program dan kebijakan pengembangan sektor. Dengan demikian, program seperti peremajaan, peningkatan produktivitas, pembangunan industri pengolahan, pengembangan koperasi, dan fasilitasi perdagangan perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan permintaan pasar, peluang produk hilir, struktur rantai nilai, dan posisi pelaku usaha lokal.

2. Rantai Nilai dan Penciptaan Nilai Tambah

Konsep rantai nilai (*value chain*) menjelaskan rangkaian aktivitas yang dilakukan sejak bahan baku diproduksi hingga produk mencapai pengguna akhir. Porter (1985) menempatkan aktivitas produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan layanan sebagai bagian dari rangkaian aktivitas yang dapat menciptakan keunggulan dan nilai ekonomi. Dalam konteks komoditas pertanian, rantai nilai mencakup hubungan antara petani sebagai produsen bahan baku, pedagang atau pengumpul, unit pengolahan, distributor, eksportir, hingga konsumen akhir.

Pada sektor kelapa sawit, rantai nilai dapat dipetakan mulai dari kegiatan budidaya dan produksi TBS, pengumpulan dan perdagangan TBS, pengolahan pada PKS menjadi CPO dan kernel, hingga pengolahan lanjutan menjadi produk oleofood, oleokimia, biodiesel, dan produk turunan lainnya. Setiap tahap memiliki potensi untuk menghasilkan nilai ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, peningkatan nilai tambah daerah tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi bahan baku, tetapi juga pada kemampuan daerah untuk mempertahankan

dan mengembangkan aktivitas pengolahan pada tahapan rantai nilai yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Kajian terbaru mengenai rantai nilai hilir kelapa sawit di kawasan industri Dumai menunjukkan bahwa kegiatan hilir di Riau telah mencakup produk oleofood, oleokimia, dan oleofuel. Namun, beberapa rantai pasok yang berkembang dalam kawasan tersebut masih beroperasi secara relatif independen dan belum menunjukkan integrasi horizontal yang kuat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan industri hilir saja belum cukup; integrasi antaraktor, tata kelola rantai nilai, dan hubungan antara sumber bahan baku dengan industri pengolahan juga menjadi faktor penting dalam penciptaan nilai tambah.

Dalam penelitian ini, analisis rantai nilai digunakan untuk mengidentifikasi posisi sektor perkebunan kelapa sawit Riau pada setiap tahapan penciptaan nilai, mulai dari produksi bahan baku hingga aktivitas hilir. Pemetaan tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik yang masih memiliki keterbatasan dalam penciptaan nilai tambah serta peluang intervensi kebijakan yang dapat memperkuat keterhubungan antara sektor hulu dan hilir.

3. Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Hilirisasi merupakan proses peningkatan tingkat pengolahan suatu komoditas dari bahan mentah atau produk setengah jadi menjadi produk yang memiliki tingkat pengolahan dan nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam industri kelapa sawit, hilirisasi dapat mencakup pengolahan TBS menjadi CPO dan kernel serta pengolahan lebih lanjut CPO dan produk turunannya menjadi minyak pangan, oleokimia, kosmetik, biodiesel, dan berbagai produk berbasis sawit lainnya.

Hilirisasi memiliki dua dimensi penting dalam konteks pembangunan daerah. Pertama, hilirisasi dapat meningkatkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari setiap unit bahan baku melalui peningkatan tingkat pengolahan. Kedua, berkembangnya aktivitas pengolahan dapat menciptakan keterkaitan ekonomi melalui investasi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha pendukung, dan peningkatan permintaan terhadap bahan baku lokal. Oleh sebab itu, strategi hilirisasi perlu mempertimbangkan bukan hanya pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi juga ketersediaan bahan baku, efisiensi logistik, kualitas produk, akses pasar, teknologi, dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha.

Hariyanti et al. (2024) menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki peran penting dalam transformasi ekonomi daerah di Riau. Penelitian tersebut menempatkan pengembangan industri kelapa sawit sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi berbasis komoditas unggulan dan pembangunan berkelanjutan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengembangan sektor sawit perlu dipandang tidak hanya dari perspektif produksi primer, tetapi juga dari kemampuan sektor tersebut menghasilkan keterkaitan ekonomi dan nilai tambah pada tingkat daerah.

Dengan demikian, hilirisasi dalam penelitian ini diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat nilai tambah daerah, sedangkan pendekatan *market-driven development* digunakan sebagai prinsip untuk menentukan arah dan prioritas hilirisasi. Artinya, tidak semua bentuk hilirisasi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan daerah. Pengembangan industri hilir perlu diarahkan pada produk dan pasar yang memiliki prospek permintaan, ketersediaan bahan baku, kelayakan ekonomi, serta kemampuan untuk melibatkan pelaku usaha lokal.

4. Pengembangan Sektor Perkebunan Berbasis Pasar

Pengembangan sektor perkebunan secara tradisional sering menempatkan peningkatan produksi dan produktivitas sebagai indikator utama keberhasilan. Namun, peningkatan produksi tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan atau nilai tambah yang proporsional apabila produk yang dihasilkan masih berada pada tahap awal rantai nilai dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap harga komoditas. Oleh karena itu, orientasi pengembangan sektor perlu diperluas dari sekadar peningkatan kapasitas produksi menuju penguatan hubungan antara produksi, pasar, pengolahan, dan kelembagaan pelaku usaha.

Dalam konteks kelapa sawit rakyat, pendekatan berbasis pasar juga berkaitan dengan kemampuan petani untuk memperoleh akses terhadap informasi harga, pasar yang lebih luas, teknologi, pembiayaan, dan hubungan kemitraan dengan industri pengolahan. Kelembagaan petani, khususnya koperasi, dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan skala ekonomi dan posisi tawar petani dalam rantai nilai. Irawan et al. (2026) menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi kelapa sawit di Riau masih menghadapi persoalan kapasitas manajerial dan kelembagaan, yang pada akhirnya dapat membatasi kemampuan koperasi dalam mengembangkan kegiatan usaha secara lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Penelitian Hatmaja et al. (2024) juga menunjukkan bahwa sebagian petani kelapa sawit swadaya di Riau belum memiliki hubungan kemitraan yang kuat dengan pabrik kelapa sawit. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap efektivitas kebijakan harga TBS dan posisi petani dalam hubungan perdagangan. Dengan demikian, orientasi pasar dalam pengembangan sektor sawit tidak hanya menyangkut pencarian pasar baru, tetapi juga penguatan institusi yang memungkinkan petani berpartisipasi secara lebih efektif dalam rantai nilai.

5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan konsep *market-driven development*, orientasi pasar, rantai nilai, dan hilirisasi, penelitian ini memandang bahwa peningkatan nilai tambah sektor kelapa sawit merupakan hasil interaksi antara empat komponen utama.

Pertama, kapasitas produksi, yang mencakup luas areal, produksi, dan produktivitas sebagai basis ketersediaan bahan baku. Kedua, struktur rantai nilai, yang menunjukkan bagaimana TBS dan produk turunannya bergerak dari sektor hulu menuju aktivitas pengolahan dan pasar akhir. Ketiga, orientasi program dan kebijakan, yang menentukan apakah intervensi pemerintah lebih banyak diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi atau telah mempertimbangkan kebutuhan pasar dan pengembangan aktivitas hilir. Keempat, kapasitas kelembagaan dan akses pasar, yang menentukan kemampuan petani, koperasi, dan pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat dari perkembangan rantai nilai. Keempat komponen tersebut menjadi dasar untuk menganalisis kondisi sektor kelapa sawit Riau. Analisis perkembangan produksi dan harga digunakan untuk menggambarkan kapasitas dan dinamika sektor. Analisis rantai nilai digunakan untuk mengidentifikasi posisi aktivitas hulu dan hilir. *Gap analysis* digunakan untuk membandingkan orientasi program daerah dengan kebutuhan pasar, sedangkan analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal sebagai dasar perumusan strategi.

Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak memandang hilirisasi sebagai pembangunan industri pengolahan semata, tetapi sebagai proses penguatan hubungan antara produksi, pasar, industri, dan kelembagaan. Pendekatan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi

pengembangan sektor kelapa sawit Riau yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan sekaligus mampu memperbesar peluang penciptaan nilai tambah di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kuantitatif dan kualitatif berbasis data sekunder. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi rantai nilai kelapa sawit, menganalisis perkembangan produksi dan harga, mengevaluasi orientasi program, serta merumuskan strategi pengembangan berbasis pasar. Lingkup penelitian mencakup Provinsi Riau dengan perhatian pada kabupaten sentra produksi, yaitu Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Siak. Periode analisis utama adalah 2021–2025.

Sumber data terdiri atas data statistik dan dokumen kebijakan. Data utama diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, meliputi luas areal, produksi, produktivitas, harga, Indeks K, PDRB, dan informasi mengenai perkebunan. Dokumen pendukung berasal dari kementerian terkait serta publikasi kebijakan mengenai hilirisasi, biodiesel, dan tata kelola ekspor.

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau digunakan sebagai sumber data luas areal, produksi, produktivitas, PDRB, dan publikasi Provinsi Riau Dalam Angka. Data tersebut digunakan untuk membentuk seri 2021–2025 dan membandingkan kondisi perkebunan rakyat, swasta, dan negara.
2. Dinas Perkebunan Provinsi Riau digunakan sebagai sumber data harga CPO, kernel, dan Indeks K serta informasi mengenai struktur perkebunan dan kelembagaan sektor. Data harga digunakan untuk melihat perubahan kondisi pasar sepanjang 2024.
3. Sumber pendukung meliputi dokumen Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kebijakan ekspor dan biodiesel serta literatur ilmiah yang relevan dengan pengembangan komoditas, rantai nilai, dan strategi berbasis pasar.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah statistik resmi dan dokumen kebijakan, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan temuan penelitian terdahulu sebagai dasar interpretasi hasil.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, analisis deskriptif kuantitatif dan tren time-series digunakan untuk memetakan perubahan luas areal, produksi, produktivitas, harga, dan indikator terkait. Kedua, value chain analysis digunakan untuk memetakan aliran TBS–CPO–produk hilir dan mengidentifikasi posisi aktivitas hilir dalam rantai nilai. Ketiga, gap analysis digunakan untuk membandingkan orientasi program daerah dengan kebutuhan dan peluang pasar. Keempat, SWOT digunakan untuk mengintegrasikan faktor internal dan eksternal sebagai dasar perumusan strategi.

1. Analisis tren dilakukan dengan membandingkan nilai awal dan akhir periode serta menghitung perubahan relatif. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah perubahan produksi lebih berkaitan dengan pertumbuhan areal atau produktivitas.

2. Value chain analysis dilakukan secara deskriptif melalui pemetaan pelaku dan aliran produk dari perkebunan rakyat/perkebunan besar menuju PKS, pengolahan lanjutan, distribusi, dan pasar. Karena data biaya, harga output, dan volume pada setiap tahap belum tersedia secara lengkap, penelitian tidak melakukan klaim perhitungan nilai tambah antaraktor.
3. Analisis SWOT digunakan untuk mengelompokkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Strategi kemudian dirumuskan dengan menghubungkan temuan empiris dari analisis tren, value chain, dan gap analysis dengan faktor SWOT.
4. Gap analysis dilakukan dengan menelaah program dan kebijakan yang relevan, kemudian mengklasifikasikan orientasinya berdasarkan fokus utama intervensi. Program yang menekankan produktivitas atau kapasitas produksi dikategorikan lebih dekat pada supply-driven, sedangkan kebijakan yang menciptakan atau merespons permintaan pasar dikategorikan sebagai market pull atau market-oriented. Klasifikasi ini bersifat analitis dan digunakan untuk membandingkan orientasi kebijakan, bukan untuk menilai keberhasilan program secara kausal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Rantai Nilai Kelapa Sawit di Provinsi Riau

Berdasarkan data resmi terbaru (Riau Dalam Angka 2026 dan Statistik Perkebunan Provinsi Riau 2024), struktur penguasaan lahan sawit Riau pada 2024 mencapai total 3.371.425 hektare, dengan komposisi berikut:

Tabel 1. Status Pengusahaan dan Luas Areal Sawit di Provinsi Riau, 2024

Status Pengusahaan	Luas Areal 2024 (Ha)	Persentase
Perkebunan Rakyat	2.296.796	68,1%
Perkebunan Besar Swasta (PBS)	999.766	29,7%
Perkebunan Besar Negara (PBN)	74.862	2,2%
Total Riau	3.371.424	100%

Sumber: BPS Provinsi Riau, Provinsi Riau Dalam Angka 2026.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perkebunan rakyat merupakan aktor dominan dari sisi penguasaan lahan. Implikasinya, strategi hilirisasi yang hanya berfokus pada investasi industri tanpa memperkuat kapasitas dan posisi tawar petani berisiko menghasilkan keterputusan antara basis produksi dan manfaat ekonomi hilir.

Tabel 2. Status Pengusahaan, Luas, Produksi, dan Produktivitas Sawit Riau, 2025

Status Pengusahaan	Luas 2025 (Ha)	Produksi 2025 (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Rakyat	2.297.238	5.721.613	2,49
PBS	999.766	3.201.082	3,20
PBN	74.862	358.906	4,79
Total Riau	3.371.866	9.281.601	2,75 (rata-rata)

Sumber: BPS Provinsi Riau, Provinsi Riau Dalam Angka 2026 (diolah).

Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan produktivitas yang cukup besar antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat menguasai 68,1% luas areal pada 2024, tetapi produktivitasnya pada 2025 sebesar 2,49 ton/ha, dibandingkan 3,20 ton/ha pada PBS dan 4,79 ton/ha pada PBN. Temuan ini menunjukkan bahwa agenda hilirisasi perlu berjalan bersama agenda peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani.

Pada sisi hilir, TBS diproses menjadi CPO dan kernel pada PKS sebelum memasuki tahapan perdagangan atau pengolahan lanjutan. Data yang tersedia dalam penelitian ini belum memberikan rekapitulasi volume CPO yang diolah di Riau dibandingkan yang keluar daerah. Karena itu, penelitian tidak menetapkan persentase tertentu mengenai “kebocoran” nilai tambah, tetapi mengidentifikasi keterbatasan data hilir sebagai salah satu hambatan penting dalam perencanaan kebijakan.

2. Tren Luas Areal, Produksi, dan Harga (2021–2025)

Tabel 3. Luas Areal Rakyat, Produksi Rakyat, dan Produktivitas, 2021–2025

Tahun	Luas Areal Rakyat (Ha)	Produksi Rakyat (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2021	1.614.004	3.701.856	2,29
2022	1.796.668	3.816.176	2,12
2023	2.288.586	5.260.275	2,30
2024	2.296.797	5.576.113	2,43
2025	2.297.238	5.721.613	2,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Provinsi Riau Dalam Angka 2026.

Selama 2021–2025, luas areal perkebunan rakyat meningkat 42,3%, produksi meningkat 54,6%, sedangkan produktivitas meningkat 8,7%. Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi lebih cepat daripada pertumbuhan produktivitas, sehingga ekspansi areal masih menjadi salah satu komponen penting pertumbuhan produksi. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk menggeser sebagian perhatian kebijakan dari sekadar penambahan kapasitas produksi menuju peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas bahan baku, dan keterhubungan dengan pasar.

Tabel 4. Harga CPO dan Kernel Plasma, 2024

Bulan	Harga CPO Plasma (Rp/Kg)	Harga Kernel Plasma (Rp/Kg)	Indeks K (%)
Januari	11.705	5.658	90,98
April	12.609	7.328	91,13
Juli	12.810	8.301	91,88
Oktober	13.946	9.782	92,46
Desember	15.466	11.644	93,07
Rata-rata 2024	13.110	8.376	91,81

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2024.

Harga CPO meningkat dari Rp11.705/kg pada Januari menjadi Rp15.466/kg pada Desember 2024 atau sekitar 32,1%. Pada periode yang sama, Indeks K meningkat dari 90,98% menjadi 93,07%. Perubahan tersebut menunjukkan kondisi harga yang lebih baik bagi pelaku hulu pada akhir tahun, tetapi juga memperlihatkan bahwa pendapatan petani tetap terkait erat dengan dinamika harga komoditas. Karena itu, strategi berbasis pasar perlu memasukkan mekanisme informasi harga dan penguatan posisi tawar petani.

Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Riau atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp115,46 triliun pada 2020 menjadi Rp204,36 triliun pada 2024. Kenaikan nominal tersebut menunjukkan semakin besarnya nilai ekonomi subsektor, tetapi tidak dapat diartikan seluruhnya sebagai peningkatan volume produksi karena dipengaruhi perubahan harga. Oleh karena itu, indikator PDRB digunakan sebagai konteks ekonomi, bukan sebagai ukuran langsung keberhasilan hilirisasi.

3. Gap Analysis: Orientasi Program dan Kebijakan Sawit Riau

Tabel 5. Gap Analysis Program dan Kebijakan Sawit Riau

Program/Kebijakan		Level	Orientasi	Catatan
Peremajaan Rakyat	Sawit	Provinsi/ Kabupaten	<i>Supply-Driven</i>	Fokus produktivitas lahan tua, belum menysasar tautan ke pasar/hilir
Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit		Provinsi/ Kabupaten	<i>Supply-Driven</i>	Alokasi berbasis luas & produksi, bukan insentif nilai tambah
Mandatori B40→B50	Biodiesel	Nasional	<i>Market Pull</i>	Menyerap ±14 juta ton CPO nasional, Riau hanya penerima dampak, bukan perancang kebijakan
Permendag (Ekspor Satu Pintu)	16/2026	Nasional	Kontrol Negara	Memperketat akses ekspor pelaku usaha daerah, berpotensi mengurangi fleksibilitas UMKM sawit lokal

Sumber: Diolah penulis, 2026.

Hasil gap analysis menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara program daerah dan kebijakan nasional. Program daerah yang dianalisis, khususnya PSR dan DBH sawit, lebih menonjolkan peningkatan kapasitas produksi dan dukungan fiskal. Sementara itu, kebijakan nasional seperti B50 menciptakan permintaan domestik baru dan kebijakan ekspor membentuk aturan akses pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan bagi Riau bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menghubungkan kebijakan produksi daerah dengan peluang permintaan dan investasi hilir yang terbentuk pada tingkat nasional.

4. Analisis SWOT Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Riau

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Basis lahan dan produksi sawit sangat besar dengan dominasi perkebunan rakyat.
2. Produksi dan indikator harga menunjukkan perkembangan positif pada periode analisis.
3. Indeks K menunjukkan perbaikan pada periode pengamatan harga 2024.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Produktivitas perkebunan rakyat sebesar 2,49 ton/ha masih tertinggal dari perkebunan besar.
2. Pertumbuhan produksi lebih cepat daripada pertumbuhan produktivitas sehingga penguatan intensifikasi masih diperlukan.
3. Informasi mengenai kapasitas dan sebaran industri hilir belum tersedia dalam format agregat yang mudah digunakan untuk perencanaan.
4. Posisi tawar sebagian petani masih dipengaruhi keterbatasan kemitraan dan akses langsung ke pasar hilir.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Implementasi mandatori B50 sejak 2026 menciptakan permintaan domestik yang besar terhadap bahan baku biodiesel dan membuka peluang pengembangan industri hilir.
2. Tujuan ekspor Riau relatif beragam sehingga tersedia ruang untuk mempertahankan dan memperluas diversifikasi pasar.
3. Besarnya basis produksi dan PDRB subsektor perkebunan dapat menjadi landasan untuk menarik investasi pengolahan apabila didukung infrastruktur dan kelembagaan yang memadai.

D. Ancaman (*Threats*)

1. Perubahan kebijakan ekspor dapat memengaruhi fleksibilitas pelaku usaha dalam mengakses pasar.
2. Fluktuasi harga CPO global tetap menjadi risiko terhadap pendapatan pelaku hulu.
3. Kesenjangan produktivitas antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar dapat membatasi kemampuan petani memenuhi permintaan industri secara konsisten.

5. Strategi Pengembangan Sektor Kelapa Sawit Berbasis Pasar

Berdasarkan integrasi hasil analisis tren, rantai nilai, gap analysis, dan SWOT, dirumuskan enam strategi utama sebagai berikut:

1. Pengembangan klaster hilirisasi berbasis sentra produksi. Investasi pengolahan lanjutan perlu diarahkan pada wilayah dengan basis bahan baku dan akses logistik yang memadai, sehingga kedekatan antara sumber bahan baku dan industri dapat menurunkan biaya transaksi serta memperbesar peluang penciptaan nilai di daerah.
2. Reorientasi replanting berbasis kepastian pasar. Program Peremajaan Sawit Rakyat perlu dihubungkan dengan penguatan koperasi, kemitraan dengan PKS atau off-taker, dan informasi kebutuhan pasar agar peningkatan produktivitas tidak berdiri sendiri dari kepastian penyerapan hasil.
3. Penguatan sistem informasi industri hilir. Pemerintah daerah perlu membangun basis data mengenai lokasi, kapasitas, jenis produk, kebutuhan bahan baku, dan akses pasar industri pengolahan. Data tersebut menjadi prasyarat bagi perencanaan investasi dan kebijakan berbasis bukti.

4. Diversifikasi pasar dan produk secara proaktif. Diversifikasi tujuan ekspor perlu dipertahankan, tetapi strategi pasar tidak berhenti pada diversifikasi negara tujuan. Pemerintah dan pelaku usaha juga perlu mendorong diversifikasi produk agar sebagian manfaat ekonomi berasal dari aktivitas pengolahan bernilai tambah lebih tinggi.
5. Sinkronisasi strategi daerah dengan kebijakan nasional. Implementasi B50 dan perubahan tata kelola ekspor perlu diperlakukan sebagai perubahan lingkungan pasar yang harus direspons oleh pemerintah daerah melalui penyiapan infrastruktur, investasi, kelembagaan, dan advokasi kepentingan pelaku lokal.
6. Penguatan kelembagaan petani. Koperasi dan kelembagaan kolektif perlu diperkuat dalam fungsi agregasi volume, peningkatan kualitas, akses informasi harga, negosiasi, dan hubungan dengan industri hilir. Penguatan kelembagaan menjadi penghubung antara basis produksi rakyat dan kebutuhan pasar.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit Riau memiliki basis produksi yang sangat besar, tetapi masih menghadapi kesenjangan produktivitas pada perkebunan rakyat dan keterbatasan informasi mengenai struktur industri hilir. Perkebunan rakyat menguasai 68,1% luas areal pada 2024, sedangkan produktivitas 2025 sebesar 2,49 ton/ha masih berada di bawah PBS dan PBN. Selama 2021–2025, pertumbuhan produksi lebih cepat daripada pertumbuhan produktivitas, menunjukkan perlunya penguatan intensifikasi dan efisiensi. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa program daerah yang dikaji lebih kuat pada peningkatan kapasitas produksi, sementara perubahan permintaan dan tata kelola perdagangan banyak dibentuk oleh kebijakan nasional. Berdasarkan integrasi analisis tersebut, strategi pengembangan berbasis pasar perlu diarahkan pada klaster hilirisasi, replanting yang terhubung dengan pasar, penguatan data industri hilir, diversifikasi produk dan pasar, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan kelembagaan petani. Penelitian ini belum mengukur nilai tambah secara langsung karena keterbatasan data biaya, output, dan volume pada setiap tahap rantai nilai; oleh sebab itu, istilah peningkatan nilai tambah dalam penelitian ini diposisikan sebagai tujuan strategis pengembangan.

Secara keseluruhan, pengembangan sektor kelapa sawit Riau perlu bergeser dari pendekatan yang hanya menekankan kapasitas produksi menuju pendekatan yang menghubungkan produksi, pasar, industri hilir, dan kelembagaan petani. Pergeseran tersebut menjadi semakin relevan setelah perubahan lingkungan kebijakan nasional pada 2026, khususnya implementasi B50 dan pengaturan ekspor kelapa sawit.

2. Saran

Bagi Pemerintah Provinsi Riau, prioritas kebijakan perlu diarahkan pada penguatan data industri hilir, fasilitasi investasi pada sentra bahan baku, pengaitan PSR dengan kemitraan pasar, serta penguatan akses informasi harga dan pasar bagi petani. Pemerintah daerah juga

perlu memastikan bahwa kebijakan pengembangan sektor selaras dengan perubahan kebijakan nasional.

Bagi pelaku usaha dan petani, penguatan koperasi atau kelembagaan kolektif perlu diarahkan pada agregasi produksi, peningkatan kualitas, negosiasi harga, dan pembangunan hubungan yang lebih kuat dengan industri pengolahan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dilanjutkan dengan data primer dari petani, PKS, industri pengolahan, dan UMKM untuk menghitung nilai tambah pada setiap tahapan rantai nilai serta menguji prioritas strategi secara kuantitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan membantu selama proses penelitian hingga artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A. F., Sandhu, H., & Millington, A. C. (2020). Quantifying the economic value of ecosystem services in oil palm dominated landscapes in Riau Province in Sumatra, Indonesia. *Land*, 9(6), 194. <https://doi.org/10.3390/land9060194>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Konsep nilai tukar petani (NTP)*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2026). *Provinsi Riau dalam angka 2026*. BPS Provinsi Riau.
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. (2025). *Statistik perkebunan Provinsi Riau tahun 2024*. Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- Febrian, R. A., & Yuza, A. F. (2023). Plantation sector policy governance by the regional government of Riau Province (leading commodities study). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 345–362. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.802>
- Gandhi, P., & Takanashi, F. (2025). Sustainable palm oil downstream value chain in industrial zones: A case study in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Environmental & Rural Development*, 16(2), 191–197. https://doi.org/10.32115/ijerd.16.2_191
- Hariyanti, F., Syahza, A., Zulkarnain, & Nofrizal. (2024). Economic transformation based on leading commodities through sustainable development of the oil palm industry. *Heliyon*, 10(4), e25674. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25674>
- Hatmaja, D., Andri, S., Heriyanto, M., & Mayarni. (2024). Pricing of fresh fruit bunches (FFB) from oil palm in Riau Province, Indonesia: Developing a collaborative governance model for sustainable agriculture. *International Journal of Religion*, 5(11), 584–593. <https://doi.org/10.61707/p51yna78>
- Heriyanto, H., Karya, D., Choanji, T., Asrol, A., Bakce, D., & Elinur, E. (2019). Regression model in transitional geological environment for calculation farming and production of

- oil palm dominant factor in Indragiri Hilir Riau Province. *Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/10.25299/jgeet.2019.4.1.2600>
- Irawan, Y. Y., Widyaningtyas, S., Arwani, M., Nanda, R. F., & Robbani, S. (2026). Strategies for institutional strengthening of an autonomous business unit of an oil palm cooperative in Riau Province. *Agroindustrial Technology Journal*, 10(1), 57–69. <https://doi.org/10.21111/atj.v10i1.25>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026, 9 Juli). Luncurkan mandatori B50, ESDM tegaskan kesiapan Indonesia perkuat kedaulatan energi. Kementerian ESDM. <https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/luncurkan-mandatori-b50-esdm-tegaskan-kesiapan-indonesia-perkuat-kedaulatan-energi>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit. <https://peraturan.beacukai.go.id/regulasi/index.html?page=detail/hal/9/1556/peraturan-menteri-perdagangan/mdag-16-2026/peraturan-menteri-perdagangan-republik-indonesia-nomor-16-tahun-2026-tentang-kebijakan-dan-pengaturan-ekspor-komoditas-sumber-daya-alam-strategis-kelapa-sawit.html>
- Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications. *Journal of Marketing*, 54(2), 1–18. <https://doi.org/10.1177/002224299005400201>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. *Journal of Marketing*, 54(4), 20–35. <https://doi.org/10.1177/002224299005400403>
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Syahza, A., Bakce, D., Irianti, M., Asmit, B., & Nasrul, B. (2021). Development of superior plantation commodities based on sustainable development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(4), 683–692. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160408>
- Usapein, P., Tuntiwiwattanapun, N., Polburee, P., Veerakul, P., Seekao, C., & Chavalparit, O. (2022). Transition pathway palm oil research framework toward a bio-circular-green economy model using SWOT analysis: A case study of Thailand. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 877329. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.877329>